

**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH, PENDAPATAN PER KAPITA,  
DAN *LEVERAGE* TERHADAP KETERAKSESAN *INTERNET*  
*FINANCIAL REPORTING* OLEH PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat)**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi  
pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

**ANUGERAH AKBAR ANTHONY PUTRA**

15043069/2015

**JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

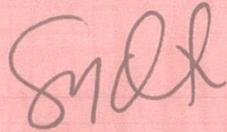
PENGARUH UKURAN PEMERINTAH, PENDAPATAN PER KAPITA,  
DAN *LEVERAGE* TERHADAP KETERAKSESAN *INTERNET*  
*FINANCIAL REPORTING* OLEH PEMERINTAH DAERAH  
(*Studi Empiris* Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi  
Sumatera Barat)

Nama : Anugerah Akbar Anthony Putra  
NIM/TM : 15043069/2015  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi

Padang, 19 Februari 2020

Disetujui Oleh:

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Akuntansi



Sany Dwita, SE, M.Si, Ph.D, Ak, CA.  
NIP. 19800103 200212 2 001

Pembimbing



Dr. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, CA, Ak.  
NIP. 19580519 199001 1 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Ujian Skripsi  
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang*

**Judul** : Pengaruh Ukuran Pemerintah, Pendapatan Per Kapita, Dan *Leverage* Terhadap Keteraksesan *Internet Financial Reporting* Oleh Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat)

**Nama** : Anugerah Akbar Anthony Putra

**NIM/TM** : 15043069/2015

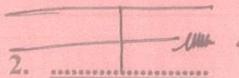
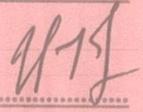
**Program Studi** : Akuntansi

**Keahlian** : Akuntansi Sektor Publik

**Fakultas** : Ekonomi

Padang, 19 Februari 2020

Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Dr. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, CA, Ak.	 1. _____
2.	Anggota	Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak.	 2. _____
3.	Anggota	Nayang Helmayunita, SE, M.Sc.	 3. _____

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anugerah Akbar Anthony Putra  
NIM/Tahun Masuk : 15043069/2015  
Tempat/Tgl. Lahir : Padang / 10 April 1997  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Komplek Taruko 1 blok K no.12, Kecamatan Kuranji, Kota Padang  
No. HP/Telp : 081363551997/-  
Judul Skripsi : Pengaruh Ukuran Pemerintah, Pendapatan Per Kapita, Dan Leverage Terhadap Keteraksasan *Internet Financial Reporting* Oleh Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **sanksi akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, 19 Februari 2020



Anugerah Akbar Anthony Putra  
15043069/2015

## ABSTRAK

**Anugerah Akbar Anthony Putra. (15043069/2015). Pengaruh Ukuran Pemerintah, Pendapatan Per Kapita Dan *Leverage* Terhadap Keteraksesan *Internet Financial Reporting* Oleh Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat)**

**Pembimbing : Dr. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, CA, Ak.**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis* 1) Bagaiamanakah ukuran pemerintah berpengaruh terhadap keteraksesan *internet financial report* oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2) Bagaiamanakah pendapatan per kapita berpengaruh terhadap keteraksesan *internet financial report* oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 3) Bagaiamanakah *leverage* berpengaruh terhadap keteraksesan *internet financial report* oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 4) Apakah ukuran pemerintah, pendapatan per kapita dan *leverage* secara bersama-sama berpengaruh terhadap keteraksesan *internet financial report* oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian ditemukan variabel ukuran pemerintah berpengaruh negatif terhadap keteraksesan *internet financial report* oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat ,dan variabel pendapatan per kapita dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap keteraksesan *internet financial report* oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

***Kata kunci* :** Ukuran Pemerintahan, Pendapatan Per Kapita, *Leverage*,  
Keteraksesan *Internet Financial Report*

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “**Pengaruh Ukuran Pemerintah, Pendapatan Per Kapita, Dan *Leverage* Terhadap Keteraksesan *Internet Financial Reporting* Oleh Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat** ”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan S-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, CA, Ak selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Fefri Indra Arza, SE., Ak., M.Sc selaku dosen penela`ah dan selaku penguji yang telah memberikan banyak saran dan perbaikan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Nayang Helmayunita, SE., M.Sc selaku penguji yang telah memberikan banyak saran dan perbaikan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Bapak Dr. Idris, M.Si serta para wakil dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan fasilitas dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Sany Dwita, SE, M.Si, PhD, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Ibu Mia Angelina Setiawan, SE, M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik (PA).
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis melakukan perkuliahan.
8. Teman-teman Jurusan Akuntansi 2015 yang telah banyak memberikan semangat dan bantuan kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih ada kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Akhirnya penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis.

Padang, 22 Februari 2020

Penulis

## Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II   TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Grand Theori .....	13
2.1.1 Teori Keagenan .....	13
2.1.2 Teori <i>Signaling</i> .....	15
2.2 Ukuran Pemerintah.....	16
2.2.1 Pengertian Ukuran Pemerintah .....	16
2.2.2 Indikator Ukuran Pemerintah.....	18
2.3 Pendapatan Perkapita .....	20
2.3.1 Pengertian Pendapatan Perkapita .....	20
2.3.2 Pengukuran Pendapatan Perkapita .....	20
2.3.3 Indikator Pendapatan Perkapita.....	20
2.4 Leverage.....	21
2.4.1 Pengertian Leverage.....	21
2.4.2 Jenis-jenis <i>Leverage</i> .....	22
2.4.3 Tujuan dan manfaat Leverage.....	25
2.4.4 Indikator Leverage .....	25
2.5 <i>Internet Financial Reporting</i> .....	26
2.5.1 Pengertian <i>Internet Financial Reporting</i> .....	26
2.5.2 Keuntungan <i>Internet Financial Reporting</i> .....	27
2.5.3 Klafisikasi .....	27
2.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi IFR .....	28
2.7 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	35
2.8 Penelitian Terdahulu .....	38
2.9 Kerangka Konseptual .....	38
2.10 Hipotesis.....	40

<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	42
3.2 Populasi dan Sampel .....	42
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	43
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.5 Jenis dan Sumber Data .....	44
3.6 Defenisi Operasional Variabel .....	44
3.7 Uji Asumsi Klasik.....	48
3.8 Metode Analisis .....	51
3.9 Metode Pengujian Hipotesis .....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Uji Asumsi Klasik.....	54
4.1.1 Uji Normalitas .....	54
4.1.2 Uji Heteroskedastisitas.....	55
4.1.3 Uji Multikolonieritas .....	56
4.2 Analisis Kuantitatif .....	57
4.2.1 Analisi Regresi Linear Berganda .....	57
4.2.2 Koefisien Determinan .....	59
4.3 Pengujian Hipotesis.....	60
4.3.1 Uji T .....	60
4.3.2 Uji F.....	61
4.4 Pembahasan.....	62
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	69
5.2 Saran .....	70
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>75</b>

## DAFTAR TABEL

1.1 Penerapan <i>Internet Financial Reporting</i> Pemda 2018 di Indonesia .....	3
1.2 Penerapan <i>Internet Financial Reporting</i> Pemda 2018 di Kota dan Kabupaten di Sumatera Barat .....	4
2.1 Penelitian Terdahulu.....	38
3.1 Indeks Keteraksesan IFR .....	45
3.2 Defenisi Operasional.....	47
4.1 Uji Normalitas .....	54
4.2 Hasil Uji Multikolonieritas .....	56
4.3 Uji Autokorelasi .....	57
4.4 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda .....	58
4.5 Uji R-Square .....	60
4.6 Uji T .....	60
4.7 Uji F .....	62

## DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Konseptual .....	40
4.1 Hasil Uji Heterkesdositas .....	55

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Penggunaan teknologi informasi dalam penyaluran informasi keuangan melalui media internet (*Internet Financial Reporting-IFR*) telah dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah di Indonesia sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah kepada para *stakeholdernya*. Hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah yang menginstruksikan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia untuk menyiapkan menu konten dengan nama “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD)” dalam *website* resmi pemerintah daerah serta memuat 12 dokumen pengelolaan anggaran dalam *website* terkait. Praktik IFR didorong dengan adanya Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa adanya penyajian informasi keuangan daerah melalui situs resmi pemerintah daerah serta setiap informasi publik bersifat terbuka, dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana (Nosihana, 2016).

Styles & Tennyson (2007) dalam Verawaty (2015) mengungkapkan bahwa internet adalah media yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan sarana yang efektif bagi pemerintah untuk mempublikasikan informasi keuangannya secara online. *Internet Financial Reporting* melalui *e-government* merupakan media yang paling memenuhi aspek *value of money* atau 3E (Efisiensi, Efektivitas, dan Ekonomi) untuk menyediakan dan mengumumkan informasi mengenai laporan keuangan kepada semua pemangku kepentingan publik antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, DPRD, BPK, analis ekonomi, investor, kreditur, donatur, dan masyarakat. .

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah daerah juga telah didorong untuk membangun situs Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai Peraturan Mendagri Nomor 35 Tahun 2010. Namun demikian, implementasi atas instruksi tersebut belum maksimal dan peraturan tersebut telah diubah sesuai perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan saat ini menjadi Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Dalam peraturan tersebut menjelaskan terdapat tiga jenis informasi yang harus dilaporkan oleh pemerintah daerah, yaitu informasi secara berkala (termasuk di dalamnya laporan keuangan pemerintah daerah), serta merta dan setiap saat.

**Tabel 1.1**  
**Penerapan *Internet Financial Reporting* Pemda 2018 di Indonesia**

No	Pemerintahan Daerah	Daerah Otonom	Tidak Memiliki Website	Perbaiki Website	Tidak Memiliki Menu TPAD	Memiliki menu TPAD
1	Propinsi	34	0	1	2	31
2	Kota	93	0	3	36	54
3	Kabupaten	415	7	24	230	154
	Jumlah	5425	7	28	268	239
	Parsentase	100%	1,29%	51,7%	49,45%	44,10%

Sumber : Destya, 2018

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan tanggal 17 sampai 31 Oktober 2018 (tabel 1.1) dapat disimpulkan bahwa 44.10% pemerintah daerah telah melakukan transparansi pengelolaan anggaran daerah sesuai Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ/2012, mayoritas pemda yang telah mengungkapkan konten TPAD secara lengkap dengan tahun anggaran terbaru berada di Pulau Jawa, diluar presentase tersebut terdapat 22 *website* pemda yang sudah membuat menu TPAD namun belum terdapat konten di dalamnya yakni, Kab.Kendal, Kab. Lamongan, Kab. Tulungagung, Kab. Alor, Kab. Belu, Kab. Ende, Kab. Timor Tengah Selatan, Kab. Saby Raijua, Kab. Barito Selatan, Kab.Poso, Kab. Sigi, Kota Palu, Kab.Bantaeng, Kab.Bone, Kab.Luwu, Kab. Pangkajene Kepulauan, Kab. Takalar, Kab. Mamuju Tengah, Kab. Seram Bagian Barat, Kota Tual, Kab. Merauke, Kab. Yahukimo, dan Kab. Sorong.

**Tabel 1.2**  
**Penerapan *Internet Financial Reporting* Pemda 2018 di Kota dan Kabupaten di Sumatera Barat**

No	Pemerintahan Daerah	Tidak Memiliki Website	Perbaiki Website	Tidak Memiliki Menu TPAD	Memiliki menu TPAD
1	Kabupaten Pesisir Selatan	-	-	√	
2	Kabupaten Solok	-	-	√	
3	Kabupaten Sijunjung	-	-		√
4	Kabupaten Tanah Datar	-	-	√	
5	Kabupaten Padang Pariaman	-	-		√
6	Kabupaten Agam	-	-		√
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	-	√	
8	Kabupaten Pasaman	-	-	√	
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	-	-		√
10	Kabupaten Dharmasraya	-	-		√
11	Kabupaten Solok Selatan	-	-	√	
12	Kabupaten Pasaman Barat	-	-		√
13	Kota Padang	-	-	√	
14	Kota Solok	-	-	√	
15	Kota Sawahlunto	-	-	√	
16	Kota Padangpanjang	-	-		√
17	Kota Bukittinggi	-	-	√	
18	Kota Payakumbuh	-	-		√
19	Kota Pariaman	-	-		√
	Jumlah	-	-	10	9
	Parsentase	-	-	52,6%	47,4%

Sumber : Data Diolah Sendiri, 2019

Namun demikian, menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mayoritas pemerintah daerah yang belum mengimplementasikan praktik IFR, dikarenakan pengungkapan tersebut lebih bersifat secara sukarela (*voluntary disclosure*) sebab belum adanya sanksi yang mengikat (Nosihana & Yaya, 2016).

Sekretariat Nasional Fitra merilis Survei Keterbukaan Anggaran (*Open Budget Survey*) menunjukkan bahwa indeks keterbukaan anggaran Indonesia tahun 2017 berada pada level 64 dari 100 poin, yang artinya mengalami peningkatan dibandingkan survey dua tahun sebelumnya sebesar 59, setelah sempat turun pada 2012 sebesar 62 poin (<https://tirto.id>). Disamping masalah tersebut tingkat pengguna internet di Indonesia berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2017 mencapai 54,68% angka tersebut setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Tingginya tingkat penggunaan internet yang di daerah menyebabkan tingginya tekanan masyarakat akan pengungkapan informasi keuangan melalui internet.

Penerapan IFR diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah yang tengah menjadi perhatian khusus para pemangku kepentingan pemerintah serta untuk menciptakan *good governance & clean governance*. Menurut *United Nation Development Program* dalam Madiasmo (2009) karakteristik pelaksanaan *good government* yakni, partisipasi, aturan hukum, transparansi, responsivitas, konsensus, keadilan, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas dan visi strategik. Pelaporan merupakan salah satu tahap penting dalam akuntabilitas publik (Mahmudi, 2011). Akuntabilitas publik dapat

dilihat dari seberapa besar tanggung jawab pemerintah daerah kepada seluruh lapisan *stakeholdernya* terutama kepada masyarakat yang telah memberikan hak kekuasaan kepada pemerintah daerah melalui pengelolaan sumber daya yang ada. Dengan adanya praktik IFR di lingkungan pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan distribusi informasi secara merata pada seluruh lapisan *stakeholder* pemerintah daerah mengingat kendala luasnya kondisi geografis Indonesia sehingga dapat meminimalkan adanya *asimetri informasi*. Pelaporan keuangan di internet (IFR) sebenarnya merupakan cara pmda agar terlegitimasi (Alhajjriana et al, 2017).

Legitimasi merupakan sebuah persepsi atau asumsi pihak eksternal bahwa suatu organisasi telah berjalan sesuai norma, aturan, dan keyakinan yang berlaku di masyarakat. Dapat diartikan dengan adanya praktik IFR dapat meyakinkan *stakeholder* pemerintah daerah terhadap kinerja yang telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Praktik pelaporan keuangan melalui internet merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi (*good governance & clean governance*) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025. Namun demikian, menurut laporan *Corruption Preceptions Index 2017* Indonesia mendapat nilai 37 dari 100 poin dan menempati peringkat 96 dari 180 negara. Hal tersebut menunjukkan pemerintah daerah di Indonesia belum mencerminkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi. Sedangkan menurut Laporan Survei Indeks Persepsi Korupsi Indonesia oleh *Transparency International Indonesia*

2017 dilakukan survey terhadap 12 kota besar di Indonesia dengan hasil Jakarta Utara sebagai kota terbersih dan Medan sebagai kota terkorup ([www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id)). Tindakan korupsi yang berlangsung dalam pemerintah daerah dapat menimbulkan krisis kepercayaan *stakeholder* pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut dalam optimalisasi IFR sebagai bentuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Manfaat lain dari praktik IFR di lingkungan pemerintah daerah yakni dapat meningkatkan partisipasi publik dan pengawasan anggaran terhadap pemerintah daerah dalam menjamin pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan.

Praktik IFR sebagai salah satu perwujudan *e-government* terus dikembangkan di Indonesia, terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menjelaskan bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan integrasi dan efisiensi manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional. Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam merespon tuntutan masyarakat dan sebagai upaya menciptakan *good and clean governance*.

Penelitian dari perspektif sektor publik yang dilakukan oleh Laswad, *et., al* (2005) dalam Ikhlas (2015) meneliti faktor *leverage*, kompetisi politik, kekayaan daerah, visibilitas pers, tipe pemerintahan, dan ukuran otoritas lokal terhadap pelaporan laporan keuangan pemerintah di internet secara sukarela. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *leverage*, kekayaan daerah, visibilitas

pers, dan tipe pemerintahan memiliki pengaruh yang positif sedangkan kompetisi politik dan ukuran otoritas lokal memiliki pengaruh yang negatif. Penelitian Styles dan Tennyson (2007) dalam Ikhlas (2015) menganalisis faktor-faktor seperti ukuran daerah, struktur pemerintahan, kualitas pengungkapan akuntansi, pendapatan per kapita, tingkat utang dan kondisi keuangan kota terhadap tingkat ketersediaan dan keteraksesan laporan keuangan tahunan komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota yang lebih besar memiliki kecenderungan melakukan pelaporan keuangan internet. Kota dengan pendapatan per kapita dan tingkat pengungkapan akuntansi yang lebih tinggi cenderung melakukan pelaporan keuangan di internet. Keteraksesan laporan secara positif memiliki hubungan dengan jumlah penduduk, pendapatan per kapita penduduk, tingkat utang dan kondisi keuangan pemerintah kota.

Adanya hubungan antara ukuran pemerintah daerah dengan pengungkapan laporan keuangan didukung oleh Robbins dan Austin (1986), Ingram dan DeJong (1987) dalam Ikhlas (2015). Pemerintah yang memiliki ukuran yang besar akan berdampak pada jumlah program dan pelayanan bagi masyarakat (Giroux and Shields, 1993). Banyaknya program dan pelayanan yang diberikan akan meningkatkan penggunaan sumber daya. Lebih lanjut, ukuran pemerintah yang besar akan memiliki kompleksitas dalam pengelolaan keuangannya sehingga akan meningkatkan pengawasan oleh para *stakeholder* khususnya masyarakat. Hal tersebut akan berimplikasi pada biaya pengawasan dan pelaporan yang tinggi sehingga untuk menekan biaya monitoring yang tinggi pemerintah harus memilih

media yang lebih efektif dan efisien dalam menyampaikan informasi keuangannya.

Hasil penelitian Laswad (2005) dalam Ikhlas (2015) menunjukkan pendapatan asli pemerintah daerah berhubungan secara positif terhadap pengungkapan yang lebih atas informasi keuangan pada *websitenya*. Pendapatan besar yang dimiliki oleh pemerintah daerah mengindikasikan kinerja baik oleh pemerintah daerah. Hal tersebut dapat menunjukkan kemandirian finansial pemerintah daerah dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Dengan demikian semakin besar pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah maka kecenderungan untuk mengungkapkan informasi keuangannya akan semakin besar. Giroux dan Deis (1993) dalam Ikhlas (2015) melaporkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara pendapatan per kapita suatu daerah dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan. Ingram (1984) dan Giroux and McLelland.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan masalah yang ditemukan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penilaian kinerja pemerintahan dengan menggunakan analisis rasio dengan judul **“Pengaruh Ukuran Pemerintah, Pendapatan Per Kapita Dan *Leverage* Terhadap Keteraksesan *Internet Financial Report* Oleh Pemerintahan Daerah (Studi Empiris Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis dapat merumuskan bahwa masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaiamanakah ukuran pemerintah berpengaruh terhadap keteraksesan *internet financial report* oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat ?
2. Bagaiamanakah pendapatan per kapita berpengaruh terhadap keteraksesan *internet financial report* oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat?
3. Bagaiamanakah *leverage* berpengaruh terhadap keteraksesan *internet financial report* oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat ?
4. Apakah ukuran pemerintah, pendapatan per kapita dan *leverage* secara bersama-sama berpengaruh terhadap keteraksesan *internet financial report* oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat ?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintahan terhadap keteraksesan *internet financial report* oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan per kapita terhadap keteraksesan *internet financial report* oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
3. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap keteraksesan *internet financial report* oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintahan, pendapatan per kapita dan *leverage* secara bersama-sama terhadap keteraksesan *internet financial report* oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah  
Dapat menjadi masukan dan motivasi dalam menyampaikan laporan keuangan secara efektif dan efisien melalui internet.
2. Bagi Pemerintah Pusat  
Sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan standar pelaporan keuangan melalui media internet.
3. Bagi Pemakai laporan keuangan

Pemakai laporan keuangan khususnya masyarakat diharapkan lebih aktif dalam mengakses laporan keuangan dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara/daerah

4. Bagi peneliti yang akan datang

hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai referensi bagi mereka juga yang tertarik untuk membahas permasalahan yang sama dengan penelitian ini.

5. Manfaat bagi penulis

Penulis mendapatkan tambahan ilmu dari materi-materi yang di gunakan dan bisa di jadikan bahan perbandingan bagi pembaca yang akan datang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Grand Theori**

##### **2.2.1 Teori Keagenan**

Dalam Teori keagenan terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan yaitu hubungan yang muncul ketika satu pihak (*principal*) memberikan/mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pihak lain (*agent*) untuk melakukan pengambilan keputusan. Lupia & McCubbins (2000) dalam Wau & Ratmono (2015) menyatakan pendelegasian terjadi ketika seseorang atau satu kelompok orang (prinsipal) memilih orang atau kelompok lain (agen) untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Hal ini dapat dilihat juga dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Banker dan Paxton (1987) Wau & Ratmono (2015) mengatakan hubungan antara pimpinan pemerintahan/politikus dengan masyarakat/pemilih dapat disebut sebagai hubungan agensi. Pada pemerintahan di Indonesia, pemda bertindak sebagai *agent* yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai kepentingan masyarakat selaku *principal*. Masyarakat selaku *principal* memberikan amanat kepada pemda untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Pemda selaku *agent* mempunyai kewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaan pemerintahan kepada masyarakat. Hasil pelaksanaan pemerintahan terkait dengan penggunaan sumber daya yang telah dipercayakan masyarakat sebagai prinsipal adalah dalam bentuk laporan keuangan.

Adanya hubungan keagenan dapat memunculkan *agency problem* berupa asimetri informasi. Pemerintah sebagai pihak yang memegang informasi lebih banyak akan cenderung memaksimalkan kepentingan pribadinya tanpa persetujuan masyarakat, sehingga terkadang masyarakat menerima informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Hal ini mengakibatkan masyarakat tidak dapat mengawasi seluruh tindakan dan keputusan yang dibuat oleh pemda. Adanya permasalahan asimetri informasi akan memunculkan apa yang disebut sebagai *agency cost* (biaya keagenan) yang harus ditanggung oleh pemerintah sebagai usaha untuk memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat. Biaya keagenan yang timbul akibat adanya asimetri informasi oleh Meckling (1976) dalam Wau & Ratmono (2015) dibagi menjadi tiga yaitu:

1. *Monitoring Cost*, yaitu biaya yang timbul untuk mengawasi perilaku *agent*.
2. *Bonding Cost*, yaitu biaya yang ditanggung oleh *agent* untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa ia akan bertindak untuk kepentingan *principal*.
3. *Residual Loss*, yaitu nilai kerugian yang dialami *principal* akibat keputusan yang diambil oleh *agent* yang menyimpang dari keputusan yang dibuat oleh *principal*.

Transparansi informasi dari pemda sangat diperlukan untuk meningkatkan hubungan antara pemda dan masyarakat, serta mengurangi konflik kepentingan. Menurut Bertot dkk., (dalam Sinaga dan Prabowo, 2011) dengan kemudahan mendapatkan informasi tentang pemerintah, seperti halnya publikasi laporan keuangan melalui internet, maka dapat meningkatkan pengawasan yang

dilakukan oleh masyarakat. Publikasi laporan keuangan pemda melalui internet juga dapat mengurangi *monitoring cost* yang harus dikeluarkan oleh *principal* dan *agent*. Melalui internet pemerintah dapat melaporkan informasinya kepada masyarakat dan pihak yang berkepentingan dengan efektif dan efisien, sehingga masyarakat dapat mengawasi kinerja pemerintah dimana saja dan kapan saja.

### **2.2.2 Teori Signaling**

Dari perspektif privat, teori *signalling* menekankan pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan *stakeholder* di luar perusahaan seperti investor. Informasi yang disampaikan oleh perusahaan merupakan unsur yang penting dalam memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan sekarang dan prediksi kondisi keuangan di masa yang akan datang. Informasi yang disampaikan oleh perusahaan haruslah informasi yang relevan dan akurat sehingga dapat diandalkan oleh *stakeholder*. Dari perspektif publik, teori *signalling* menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pihak yang diberi amanat oleh masyarakat berkeinginan menunjukkan sinyal yang baik kepada masyarakat. Pemerintah mendapat tekanan dari masyarakat untuk memberikan informasi mengenai kinerja dan pencapaianpencapaian pemerintah. Teori *signalling* dapat membantu pemerintah (agen) dan masyarakat (prinsipal) dalam mengurangi asimetri informasi. Pemerintah dapat mengurangi asimetri informasi dengan cara memberikan sinyal kepada masyarakat melalui pengungkapan laporan keuangan yang berkualitas, peningkatan sistem pengendalian intern dan pengungkapan yang lebih lengkap.

Dalam kerangka teori sinyal disebutkan bahwa dorongan untuk memberikan informasi adalah karena adanya asimetri informasi antara pemda dengan pihak luar, khususnya masyarakat. Salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi adalah dengan memberikan sinyal yang baik kepada masyarakat berupa informasi keuangan yang positif dan dapat dipercaya. Internet merupakan media yang paling efektif bagi pemda untuk menunjukkan sinyal positif kepada masyarakat. Pemda akan berusaha melakukan pelaporan keuangan melalui *website* secara lebih optimal untuk menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat (Puspita dan Martani, 2012). Masyarakat juga dapat dengan mudah dan cepat mengakses informasi keuangan terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, sehingga dapat mengurangi asimetri informasi yang terjadi.

## **2.2 Ukuran Pemerintah**

### **2.2.1 Pengertian Ukuran Pemerintah**

Ukuran pemerintah daerah adalah sebuah skala yang dapat menunjukkan besar kecilnya keadaan Pemerintah Daerah (Hartono, et al., 2014). Ukuran daerah mengacu pada seberapa besar organisasi. Pemerintah daerah dengan ukuran besar sangat diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada publik. Harapan serta tuntutan terhadap pemerintah daerah akan memacu kinerja pemerintah daerah yang lebih baik.

Peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu cara dalam meningkatkan rasio kemandirian dalam suatu pemerintah daerah. Salah satu pengukuran kinerja yang dapat

menggambarkan kinerja pemerintah daerah adalah pengukuran kinerja keuangan (Sari, 2016). Informasi yang terkandung dalam laporan pertanggungjawaban atau laporan keuangan pemerintah daerah dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah (Abdullah, 2013; Mahmudi, 2007 dalam Junarwati et al 2013). Kinerja keuangan adalah salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diinginkan, di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi di dalam daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal yang penting bagi pemerintah daerah dan pihak eksternal. Data pengukuran kinerja keuangan yang bersumber dari informasi finansial yang diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat, dapat menjadi peningkatan program selanjutnya demi menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas (Sari, 2016). Muhayanah (2016) mengungkapkan dalam rangka dan upaya menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kewenangan fiskal, suatu daerah harus dapat mengetahui potensi sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah itu sendiri. Menurut Maiyora (2015) ukuran pemerintah daerah yang besar dapat membantu kegiatan operasional pemerintah daerah yang diiringi dengan meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut

disebabkan karena pemerintah daerah yang memiliki ukuran aset besar memiliki tekanan yang besar untuk melakukan pengungkapan atas laporan keuangannya. DPRD merupakan bentuk lembaga perwakilan rakyat daerah (propinsi/kabupaten/kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah bersama dengan pemerintah daerah (Sari, 2016). Ukuran legislatif memiliki arti banyaknya jumlah anggota legislatif yang bertugas mengawasi pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang ada untuk dapat digunakan dengan baik (Novianti et al, 2016). Kinerja yang baik dalam suatu pemerintah daerah dapat dilihat dari jumlah anggota legislatif yang terpilih. Banyaknya jumlah anggota DPRD diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam proses peningkatan kinerja pemerintah daerah.

### **2.2.2 Indikator Ukuran Pemerintah**

Faktor politik pun bisa dijadikan ukuran berpengaruh atau tidaknya suatu daerah mengungkapkan laporan keuangan di internet. Penelitian dari Junaedi (2015) menunjukkan hasil bahwa Leverage mempunyai pengaruh dalam pengungkapan pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah. Tetapi Rahman et al (2013), Trisnawati dan Achmad (2014) menunjukkan hasil yang berbeda. Faktor lain seperti Ukuran Pemerintah yang dijadikan variabel penelitian pun juga mengalami perbedaan hasil yaitu penelitian yang dilakukan Rahman et al (2013) menunjukkan ketidak pengaruhan Ukuran Pemerintahan

terhadap tingkat pengungkapan pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah. Sedangkan penelitian Trisnawati dan Achmad (2014) menunjukkan bahwa Ukuran Pemerintahan mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah.

*Size* dapat diukur dengan jumlah karyawan, total aset, total pendapatan dan tingkat produktifitas (Damanpour, 1991) dalam Suhardjanto, et al, (2010). Ukuran pemerintah daerah dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010) yaitu diproksikan dengan menggunakan total aset. Akan tetapi, dalam penelitian ini terdapat sedikit perbedaan dengan penelitian Sumarjo (2010), dimana ukuran pemerintah daerah diproksikan dengan logaritma natural dari total aset ( $\ln$  aktiva). Hal ini dikarenakan besarnya total aset masing-masing pemerintah daerah berbeda bahkan mempunyai selisih yang besar, sehingga dapat menyebabkan nilai yang ekstrem. Untuk menghindari adanya data yang tidak normal tersebut maka data total aset perlu di  $\ln$  kan. Pertimbangan pengukuran ini karena nilai aktiva lebih stabil dari pada nilai penjualan bersih dan kapitalisasi pasar (Wuryaningsih, 2002) dalam Sumarjo (2010).

## **2.3 Pendapatan Perkapita**

### **2.3.1 Pengertian Pendapatan Perkapita**

Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu Negara. Variable yang digunakan untuk menghitung pendapatan per kapita adalah pendapatan nasional dan jumlah penduduk (Damayanti, 2013).

### **2.3.2 Pengukuran Pendapatan Perkapita**

Secara matematis, rumus perhitungan pendapatan perkapita adalah 
$$\text{Pendapatan per kapita} = \frac{\text{Pendapatan Nasional Bruto (GNP)}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$
 Pendapatan per kapita (*per capita income*) adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan per kapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan per kapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara; semakin besar pendapatan perkapitanya, semakin makmur negara tersebut. Konsep pendapatan nasional yang biasa dipakai dalam menghitung pendapatan per kapita pada umumnya adalah Pendapatan Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB).

### **2.3.3 Indikator Pendapatan Perkapita**

Sebagai indikator ekonomi yang mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu negara, pendapatan per kapita di hitung secara berkala

(Periodik) biasanya satu tahun. Manfaat dari perhitungan pendapatan perkapita antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun.
- 2) Sebagai data perbandingan kesejahteraan suatu negara dengan negara lain. Dari pendapatan per kapita masing – masing negara dapat di lihat tingkat kesejahteraan tiap negara.
- 3) Sebagai perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lainnya. Dengan mengambil dasar pendapatan perkapita dari tahun ke tahun, dapat di simpulkan apakah pendapatan per kapita suatu negara rendah (bawah), sedang atau tinggi.
- 4) Sebagai data untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi. Pendapatan per kapita dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil langkah di bidang ekonomi (Rahman, 2015).

## **2.4 Leverage**

### **2.4.1 Pengertian *Leverage***

*Leverage* adalah penggunaan aset dan sumber dana (*source of funds*) oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham (Sartono, 2013:257). *Leverage* adalah suatu tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva dan atau dana yang mempunyai beban tetap (hutang dan atau saham istimewa) dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimisasi kekayaan pemilik perusahaan.

## 2.4.2 Jenis-jenis *Leverage*

### a. *Leverage* Operasi (*operating leverage*)

*Leverage* operasi adalah seberapa besar perusahaan menggunakan beban tetap operasional (Hanafi, 2014:327). Menurut Syamsuddin (2015:107), *leverage* operasi adalah kemampuan perusahaan di dalam menggunakan *fixed operating cost* untuk memperbesar pengaruh dari perubahan volume penjualan terhadap *earning before interest and taxes* (EBIT). *Leverage* operasi timbul sebagai suatu akibat dari adanya beban-beban tetap yang ditanggung dalam operasional perusahaan. Perusahaan yang memiliki biaya operasi tetap atau biaya modal tetap, maka perusahaan tersebut menggunakan *leverage*. Dengan menggunakan *operating leverage* perusahaan mengharapkan bahwa perubahan penjualan akan mengakibatkan perubahan laba sebelum bunga dan pajak yang lebih besar. Beban tetap operasional tersebut biasanya berasal dari biaya depresiasi, biaya produksi dan pemasaran yang bersifat tetap misal gaji karyawan. Sebagai kebalikannya adalah beban variabel operasional. Contoh biaya variabel adalah biaya tenaga kerja yang dibayar berdasarkan produk yang dihasilkan.

*Leverage* operasi adalah pengaruh biaya tetap operasional terhadap kemampuan perusahaan untuk menutup biaya tersebut. Dengan kata lain pengaruh perubahan volume penjualan (Q) terhadap laba sebelum bunga dan pajak (EBIT). Besar kecilnya *leverage* operasi dihitung dengan DOL (*Degree of operating leverage*) yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{DOL} = \frac{\text{persentase perubahan EBIT}}{\text{persentase perubahan penjualan}}$$

Rumus *Leverage* Operasi (*operating leverage*)

Analisis *leverage* operasi dimaksudkan untuk mengetahui seberapa peka laba operasi terhadap perubahan hasil penjualan dan berapa penjualan minimal yang harus diperoleh agar perusahaan tidak menderita kerugian.

b. *Leverage* Keuangan (*financial leverage*)

*Financial leverage* adalah penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan beranggapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar dari pada beban tetapnya sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham (Sartono, 2013:263).

Kebijakan perusahaan mendapatkan modal pinjaman dari luar ditinjau dari bidang manajemen keuangan, merupakan penerapan *Financial Leverage* dimana perusahaan membiayai kegiatannya dengan menggunakan modal pinjaman serta menanggung suatu beban tetap yang bertujuan untuk meningkatkan laba per lembar saham. *Financial Leverage* timbul karena adanya kewajiban-kewajiban finansial yang sifatnya tetap (*fixed financial charges*) yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Kewajiban-kewajiban finansial yang tetap ini tidaklah berubah dengan adanya perubahan tingkat EBIT dan harus di bayar tanpa melihat sebesar apa pun tingkat EBIT yang dicapai perusahaan.

Besar kecilnya *leverage* finansial dihitung dengan DFL (*Degree of financial leverage*). DFL menunjukkan seberapa jauh perubahan EPS karena perubahan tertentu dari EBIT. Makin besar DFL nya, maka makin besar risiko finansial perusahaan tersebut. Dan perusahaan yang mempunyai DFL yang tinggi adalah perusahaan yang mempunyai utang dalam proporsi yang lebih besar. DFL (*Degree of financial leverage*) dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{DFL} = \frac{\text{persentase perubahan EPS}}{\text{persentase perubahan EBIT}}$$

Rumus *Leverage* Keuangan (Financial Leverage)

DFL yang besar menunjukkan bahwa perubahan tingkat EBIT akan menghasilkan perubahan yang besar pada laba bersih (EAT) atau pendapatan per lembar saham (EPS). Beban tetap bunga ini pada kenyataannya dapat berupa beban seluruh utang atau obligasi yang ada dan biaya deviden untuk saham preferen yang mempunyai beban pembayaran tetap setelah perhitungan sebelum pajak.

c. *Leverage* Gabungan (*Combination Leverage*)

*Combination leverage* terjadi apabila perusahaan memiliki baik *operating leverage* maupun *financial leverage* dalam usahanya untuk meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham biasa (Sartono, 20013:267). *Leverage* gabungan adalah pengaruh perubahan penjualan terhadap perubahan laba setelah pajak untuk mengukur secara langsung

efek perubahan penjualan terhadap perubahan laba rugi pemegang saham dengan *Degree of Combine Leverage* (DCL) yang didefinisikan sebagai persentase perubahan pendapatan per lembar saham sebagai akibat persentase perubahan dalam unit yang terjual.

### 2.4.3 Tujuan dan manfaat Leverage

Menurut Kasmir (2015), tujuan perusahaan menggunakan rasio leverage, diantaranya yaitu:

- a. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor).
- b. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
- c. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
- d. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
- e. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.

### 2.4.4 Indikator Leverage

Menurut Kasmir (2015) indikator dalam mengukur *leverage* adalah

$$DER = \frac{KEWAJIBAN}{EKUITAS}$$

## 2.5 *Internet Financial Reporting*

### 2.5.1 *Pengertian Internet Financial Reporting*

Mendefinisikan IFR sebagai suatu kondisi ketika suatu pemerintahan menyediakan hal-hal berikut ini dalam *website* pemerintahan : (1) satu set laporan keuangan komprehensif (termasuk *footnote* dan laporan auditor), (2) terdapat suatu *link* ke laporan tahunan, (3) terdapat *link* ke badan keuangan pemerintah. Hunter menjelaskan bahwa IFR merujuk pada penggunaan *website* pemerintahan dalam menyebarkan informasi tentang performa keuangan pemerintahan . Informasi keuangan yang disajikan dalam IFR mencakup laporan keuangan komprehensif, termasuk di dalamnya *footnotes*, bagian laporan keuangan, *financial highlights* dan ringkasan laporan keuangan (Jurnal Akuntansi riset. Prodi Akuntansi UPI. Vol. 4. No. 2). *Internet Financial Reporting* adalah suatu cara yang dilakukan pemerintahan untuk mencantumkan laporan keuangannya melalui internet, yaitu melalui *website* yang dimiliki pemerintahan. Literatur akuntansi yang ada menyatakan bahwa IFR dikenal sebagai pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*), bukan karena isi pengungkapannya tetapi karena alat yang digunakan (Manullang et al. 2014). Salah satu manfaat utama dari IFR adalah potensi penghematan besar dalam biaya produksi dan distribusi informasi keuangan. Internet memungkinkan pemerintahan untuk mencapai biaya yang relatif lebih rendah. Selain itu penggunaan IFR juga menyebabkan penurunan

permintaan insidental dari pengguna laporan keuangan non-pemegang saham (Manullang et al. 2014)

### **2.5.2 Keuntungan IFR (*internet financial reporting*)**

Ada beberapa keuntungan yang didapatkan dengan menerapkan IFR (Ashbaugh *et al.*,2016). Pertama, penggunaan internet sebagai media penyampaian laporan keuangan merupakan suatu penghematan bagi pemerintahan karena tidak perlu lagi mencetak laporan keuangan menggunakan kertas. Kedua, proses pendistribusian laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan juga lebih efisien dan *realtime*, karena pihak yang ingin melihat laporan keuangan pemerintahan dapat langsung memperolehnya melalui internet. Ketiga, kemudahan dalam mengakses informasi terkini, yang mana setiap investor dapat mengakses informasi laporan keuangan dengan cepat dan mudah dimanapun dan kapanpun mereka mau. Keempat, menyediakan media komunikasi dua arah antara manajemen pemerintahan dengan pengunjung *website*.

### **2.5.3 Klasifikasi**

Menurut Damayanti (2013), pengukuran *Internet Finacial Reporting* (IFR) didasarkan pada *IFR Index* yang dikembangkan berdasarkan 4 kriteria yang terdiri atas *content*, ketepatan waktu, penggunaan teknologi, dan dukungan pengguna.

- a. *Isi/Content*, dalam kategori ini meliputi komponen informasi keuangan seperti laporan neraca, rugi laba, arus kas, perubahan posisi keuangan serta laporan keberlanjutan pemerintahan . Informasi

keuangan yang diungkapkan dalam bentuk *html* memiliki skor yang tinggi dibandingkan dalam format *pdf*, karena informasi dalam bentuk *html* lebih memudahkan pengguna informasi untuk mengakses informasi keuangan tersebut menjadi lebih cepat.

- b. Ketepatanwaktuan, ketika *website* pemerintahan dapat menyajikan informasi yang tepat waktu, maka semakin tinggi indeksnya.
- c. Pemanfaatan teknologi, komponen ini terkait dengan pemanfaatan teknologi yang tidak dapat disediakan oleh media laporan cetak serta penggunaan media teknologi multimedia, *analysis tools*(contohnya, *18Excel's Pivot Table*), fitur-fitur lanjutan (seperti implementasi “*Intelligent Agent*”atau XBRL).
- d. *User Support*, indeks *website* pemerintahan semakin tinggi jika pemerintahan mengimplementasikan secara optimal semua sarana dalam *website* pemerintahan. Media pencarian dan navigasi/*search and navigation tools* (seperti FAQ, *links to homepage*, *site map*, *site search*).

## 2.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi IFR

Penelitian dari perspektif sektor publik yang dilakukan oleh Laswad, et., al (2013) meneliti faktor *leverage*, kompetisi politik, kekayaan daerah, visibilitas pers, tipe pemerintahan, dan ukuran otoritas lokal terhadap pelaporan laporan keuangan pemerintah di internet secara sukarela. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *leverage*, kekayaan daerah, visibilitas pers, dan tipe pemerintahan memiliki pengaruh yang

positif sedangkan kompetisi politik dan ukuran otoritas lokal memiliki pengaruh yang negatif. Penelitian menganalisis faktor-faktor seperti ukuran daerah, struktur pemerintahan, kualitas pengungkapan akuntansi, pendapatan per kapita, tingkat utang dan kondisi keuangan kota terhadap tingkat ketersediaan dan keteraksesan laporan keuangan tahunan komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota yang lebih besar memiliki kecenderungan melakukan pelaporan keuangan internet. Kota dengan pendapatan per kapita dan tingkat pengungkapan akuntansi yang lebih tinggi cenderung melakukan pelaporan keuangan di internet. Keteraksesan laporan secara positif memiliki hubungan dengan jumlah penduduk, pendapatan per kapita penduduk, tingkat utang dan kondisi keuangan pemerintah kota.

## **2.6.1 Pemerintahan daerah**

### **1. Pengertian Pemerintah Daerah**

Pemerintahan daerah merupakan pelaksana dan penanggung jawab semua kegiatan pemerintahan yang di daerah otonom. Yang menjadi peran utama dari pemerintah daerah adalah melaksanakan pelayanan sebaik mungkin terhadap kepentingan masyarakat dan melaksanakan pelaksanaan sebagai usaha untuk memajukan daerah otonom tersebut. Pemerintah daerah sebagai pengelola manajemen daerah otonom, disatu sisi memiliki tanggung jawab terhadap pemerintah pusat sebagai pemberi kewenangan atas pelaksanaan otonomi daerah dan pengendal Negara Kesatuan Republik Indonesia,

namun di sisi lain pemerintah daerah, juga harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat. Pemerintahan daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi.

Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala

daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Selain itu, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan: Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan; Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Dalam rangka

melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan Pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

### **2.6.2 Tipe Pemda**

Tipe Pemda di Indonesia terdiri dari Pemda Tingkat I dan Pemda Tingkat II, dimana Pemda tingkat I yaitu provinsi dan Pemda tingkat II yaitu kabupaten dan kota. Dalam penelitian ini menggunakan Pemda tingkat II, penelitian mengungkapkan dimana tipe pemerintahan yang berbentuk kota yang penduduknya lebih besar dan beragam membuat situs pemerintahan daerahnya lebih canggih dan lebih banyak informasi yang diungkap pada situsnya, adanya akses internet yang lebih baik pada daerah kota menyebabkan tingkat pengungkapan pada daerah kota lebih tinggi daripada di kabupaten. Sehingga disini pemerintah di kota lebih mengoptimalkan hal tersebut terutama dalam pengungkapan laporan keuangan. Penelitian Medina (2012), Trisnawati dan Achmad (2014), Rahman dkk (2014) menunjukkan bahwa tipe Pemda memiliki pengaruh terhadap pelaporan keuangan.

### 2.6.3 Ukuran Pemda

Semakin besar aset yang dimiliki suatu daerah menandakan semakin besar juga ukuran Pemda tersebut. Aset dapat mewakili seberapa besar pemerintahan, semakin besar aset maka semakin banyak modal yang ditanam. Maka dari itu ukuran Pemda yang besar mengindikasikan terdapat jumlah kekayaan yang besar pula, pengawasan dari masyarakat akan kegiatan pemerintah akan semakin ketat pula karena terdapat kekhawatiran adanya penyelewengan dana yang mungkin saja terjadi. Pemerintah pasti akan berusaha sebisa mungkin mengurangi asimetri informasi keuangan terhadap masyarakat yang mulai beranggapan negatif dengan mempublikasikan laporan keuangannya, karena telah adanya *e-government* tersebut maka akan dipilih karena penggunaannya yang mudah dan cepat. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Hilmi dan Martani (2013) dan Medina (2012).

### 2.6.4 Kekayaan Pemda

Kekayaan daerah mencerminkan bagaimana kinerja sebuah Pemda, sehingga jika suatu Pemda memiliki kekayaan yang tinggi akan berusaha untuk menunjukkannya terhadap para *stakeholders* sebagai bentuk signal dari manajemen public yang baik. Kekayaan daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah equitas dana. PAD terdiri dari: (1) Pajak daerah, (2) Retribusi daerah, (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,

dan (4) Lain-lain PAD yang sah. Kekayaan daerah yang kecil menunjukkan kinerja pemerintah yang buruk, sedangkan Pemda yang memiliki kinerja yang buruk akan menghindari pengungkapan sukarela dan akan lebih memilih untuk membatasi akses informasi kepada masyarakat. Pemda yang berkinerja baik akan mengungkapkan informasi lebih banyak dan menggunakan teknik pengungkapan yang lebih baik sesuai dengan teori *signaling*. Publikasi laporan keuangan pada *e-government* Pemda dapat menyampaikan hasil kerjanya dengan mudah dan murah, hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Rahman dkk (2014), dan Trisnawati dan Achmad (2014).

#### **2.6.6 Opini Audit**

Hasil kinerja pemerintah juga tertuang di dalam laporan keuangannya, setiap akhir periode akuntansi pemerintah diwajibkan menyerahkan laporan keuangan kepada auditor independen yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK akan melakukan pemeriksaan pada laporan keuangan dengan tujuan mendapatkan opini audit. Dari opini audit inilah yang nantinya dijadikan alat pengukur kinerja dari suatu Pemda apakah kualitas akuntabilitas keuangannya baik atau tidak. Terdapat lima (5) opini audit dalam laporan keuangan yaitu: Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemda yang mendapatkan hasil opini audit WTP biasanya akan lebih cenderung untuk mempublishkan laporan

keuangannya agar masyarakat mengetahui bagaimana kinerja Pemda tersebut (Trisnawati dan Achmad, 2014)..

## **2.7 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, yang jika diuraikan adalah sebagai berikut:

### **a. Laporan Realisasi Anggaran;**

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Komponen laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. SAP berbasis akrual mengakui komponen LRA menggunakan basis kas. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan

antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Laporan Operasional;

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

d. Laporan Perubahan Ekuitas;

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

e. Neraca;

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal

tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.

f. Laporan Arus Kas;

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.

g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

## 2.8 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

NO	NAMA PENULIS (Tahun)	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Ikhlas (2015)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi ketersediaan dan keteraksesan <i>internet financial reporting</i> (IFR) oleh Pemerintah Daerah	Hasil penelitian menggunakan regresi logistik ordinal menemukan bahwa pendapatan per kapita masyarakat dan opini audit berpengaruh positif terhadap ketersediaan informasi keuangan pada <i>website</i> pemerintah. Hasil penelitian menggunakan regresi berganda menemukan bahwa rasio kemandirian finansial pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap keteraksesan informasi keuangan pada <i>website</i> pemerintah
2	Wau, I., & Ratmono. (2015).	Analisis Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Ketersediaan Dan Keteraksesan <i>Internet Financial Reporting</i> Oleh Pemerintah Daerah. <i>Diponegoro Journal of Accounting</i> , 4(4): 1-12.	Hasil penelitian ditemukan ada pengaruh ukuran pemerintahan dan pendapatan per kapita terhadap Ketersediaan Dan Keteraksesan <i>Internet Financial Reporting</i> Oleh Pemerintah Daerah.

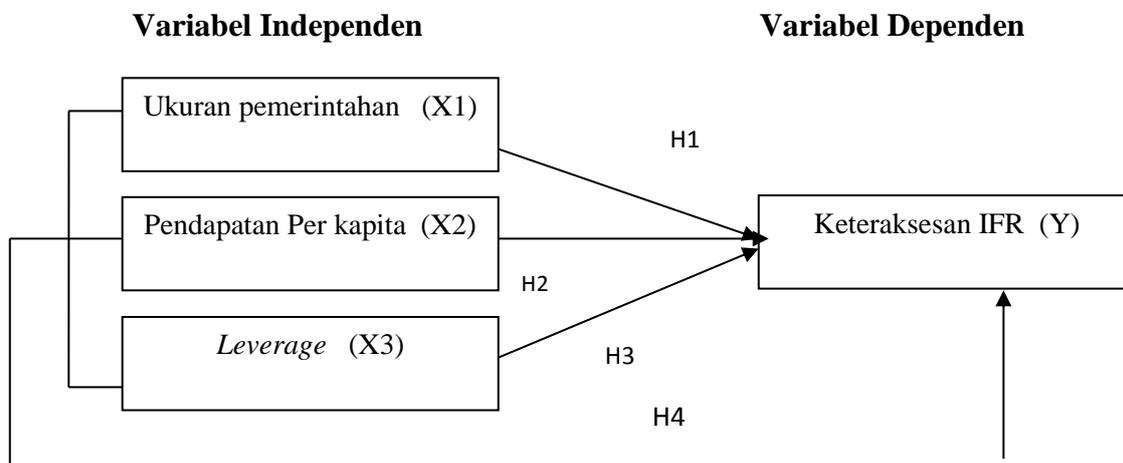
## 2.9 Kerangka Konseptual

Penelitian menganalisis faktor-faktor seperti ukuran pemerintahan, struktur pemerintahan, kualitas pengungkapan akuntansi, pendapatan per kapita, tingkat utang dan kondisi keuangan kota terhadap tingkat

ketersediaan dan keteraksesan laporan keuangan tahunan komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota yang lebih besar memiliki kecenderungan melakukan pelaporan keuangan internet. Kota dengan pendapatan per kapita dan tingkat pengungkapan akuntansi yang lebih tinggi cenderung melakukan pelaporan keuangan di internet. Keteraksesan laporan secara positif memiliki hubungan dengan jumlah penduduk, pendapatan per kapita penduduk, tingkat utang dan kondisi keuangan pemerintah kota. Penelitian dari perspektif sektor publik yang dilakukan oleh Laswad, et., al (2013) meneliti faktor *leverage*, kompetisi politik, kekayaan daerah, visibilitas pers, tipe pemerintahan, dan ukuran otoritas lokal terhadap pelaporan laporan keuangan pemerintah di internet secara sukarela. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *leverage*, kekayaan daerah, visibilitas pers, dan tipe pemerintahan memiliki pengaruh yang positif sedangkan kompetisi politik dan ukuran otoritas lokal memiliki pengaruh yang negatif.

Penelitian Wau, I., & Ratmono. (2015) ditemukan ada pengaruh ukuran pemerintahan dan pendapatan per kapita terhadap Ketersediaan Dan Keteraksesan *Internet Financial Reporting* Oleh Pemerintah Daerah

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**



### 2.10 Hipotesis

Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan maka dirumuskan, sebagai berikut :

H1 : Ukuran pemerintahan berpengaruh negatif terhadap keteraksesan *internet financial report* oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

H2 : Pendapatan per kapita tidak berpengaruh terhadap keteraksesan *internet financial report* oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

H3 : *Leverage* tidak berpengaruh terhadap keteraksesan *internet financial report* oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

H4 : Ukuran pemerintahan, pendapatan per kapita dan *leverage* secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap keteraksesan *internet financial report* oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat ?

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

1. Variabel ukuran pemerintah berpengaruh negatif terhadap keteraksesan *internet financial report* oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat nilai (sig = 0,040 < 0,05).
2. Variabel pendapatan per kapita tidak berpengaruh terhadap keteraksesan *internet financial report* oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (sig = 0,223 > 0,05).
3. Variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap keteraksesan *internet financial report* oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (sig = 0,478 > 0,05)
4. Secara bersama-sama variabel ukuran pemerintahan, pendapatan per kapita dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap keteraksesan *internet financial report* oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

#### 5.2 Saran

- 5.2.1 Peneliti dapat mengembangkan penelitian dengan mempertimbangkan variabel lainnya yang dianggap mampu mempengaruhi keteraksesan *internet financial report* seperti tingkat penetrasi internet, alokasi belanja daerah untuk teknologi informasi, tingkat investasi, kompetisi politik, dan visibilitas media.

- 5.2.2 Pada pendapatan per kapita terlihat tidak terdapat pengaruh terhadap keteraksesan *internet financial report* oleh sebab itu sebaiknya dicari variabel lain yang memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap keteraksesan *internet financial report*.
- 5.2.3 Peneliti dapat menambah sampel penelitian seperti badan publik, pemerintah provinsi atau pengambilan sampel Pemda yang mewakili 34 provinsi di Indonesia serta menggunakan periode tahun yang lebih lama untuk melihat perkembangan yang ada.
- 5.2.4 Sebaiknya penelitian ini bisa jadi masukan bagi peneliti berikutnya dengan menambah variabel lain dan objek penelitian yang berbeda.

### **5.3 Keterbatasan penelitian**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan sampel sebanyak 19 sampel oleh sebab itu perlu penelitian selanjutnya untuk menambah jumlah sampel guna melihat hasil yang lebih signifikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alhajriana et al, 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi Di Internet Oleh Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(3): 1–11.
- Ashbaugh, Hollis, Karla M. Johstone, dan Terry D. Warfield. 2016. Corporate Reporting on the Internet. *Accounting Horizons*. 13(3):241-257.
- Afryansyah, Rahmad D dan Haryanto. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi di Internet oleh Pemerintah Daerah” *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 2, No. 3, Tahun 2013.
- Damayanti, K. 2013. "Internet Financial Reporting (IFR) dan Reaksi Pasar". Skripsi. Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
- Destya. 2018. Determinan Praktik Internet Financial Reporting (IFR) dalam Website Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2016-2017)
- <http://tiaraputri.wordpress.com/2010/01/09/pendapatan-nasional-dan-pendapatan-perkapita/>
- Hartono, R, A. Mahmud dan N.S. Utaminingsih. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Mataram. Lombok; 1-13.
- Hanafi. 2014. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: BPFE UGM. Jurnal Akuntansi riset. Prodi Akuntansi UPI. Vol. 4. No. 2 thn 2014.
- Hilmi, A.K., dan Martani, D. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin.
- <http://skripsiilmiah.blogspot.co.id/2013/02/peranan-pemerintah-daerah-dalam.html><http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sesma/files/Buku%20>
- Ikhlas. 2015. Faktor-faktor yang Mempengaruhi ketersediaan dan keteraksesan *internet financial reporting* (IFR) oleh Pemerintah Daerah
- Idris. 2014. *Analisis Data Kuantitatif*. UNP Padang.
- Junarwati et al. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2010-2012*. Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala. Jurnal Telaah& Riset Akuntansi Vol. 6 No. 2 : 186-193.

- Junaedi. 2015. Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah, Ketergantungan Daerah, Kompleksitas, Tipe Pemerintah Daerah, Kualitas Audit Dan Tingkat Penyimpangan Anggaran Terhadap Pengungkapan Internet-Based Financial Reportin”. *Jurnal Sainstech Politeknik Indonusa Surakarta* ISSN : 2355-5009 Vol. 2 Nomor 4 Desember Tahun 2015.
- Laswad, Fawzi dkk. 2005. Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24; 101–121.
- Muhyannah. 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2013*. Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Maiyora. 2015. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Studi Empiris Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera)*. Faculty of Economics Riau University. Pekanbaru. *Jom FEKON* Vol. 2 No. 2.
- Manullang, M.S.G., Sinarwati, N.K. & Yuniarta, G.A., (2014). Pengaruh Internet Financial Reporting Dan Tingkat Pengungkapan Informasi Berbasis Website Terhadap Frekuensi Perdagangan Saham Perusahaan ( Studi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar. , 1(1).
- Mahmudi, 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press
- Madiasmu 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Medina, F. 2012. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Pada Situs Resmi Pemda. Penelitian FEUNDIP 2012.
- Nosihana & Yaya, 2016. Internet Financial Reporting Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2): 89–104.
- Novianti *et al.* 2016. *Pengaruh Ukuran Legislatif, Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta. E-Jurnal Bung Hatta Volume 9, No 1.

- Puspita dan Martani, 2012. Analisis Pengaruh Kinerja Dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan Dan Kualitas Informasi Dalam Website Pemda. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*, 1–25, September 2012
- Rahman, A., Sutaryo, dan Budiattanto, A. 2013. “Determinan Internet Financial Local Government Reporting di Indonesia”. *Simposium Nasional Akuntansi XVI, Manado*, 25-28 September 2013.
- Ratmono dan iklas wau 2015. “Analisi Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan Dan Keteraksesan Internet Financial Reporting Oleh Pemerintah Daerah” *Diponogoro Jurnal of Accounting ISSN :2337-3806 Vol. 4 Nomor 4 Tahun 2015*.
- Rahman, Sutaryo dan Budiattanto. 2014. *Determinan Internet Financial Local Governmen Reporting di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado*
- Sesotyaningtyas, 2012. Pengaruh *Leverage*, Ukuran Legislatif, *Intergovernmental Revenue* dan Pendapatan Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa). *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang
- Sari. 2016. *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pad, Leverage, Dana Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/Kota Pulau Sumatra)*. *Faculty of Economics Riau University*. Pekanbaru. JOM Fekon Vol 3 No 1.
- Sartono, Agus. 2013. *Manajemen keuangan teori, dan aplikasi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Syamsudin, Lukman. 2015. *Manajemen Keuangan Perusahaan (Konsep Aplikasi Dalam Perencanaan, Pengawasamn, dan Pengambilan Keputusan)*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Sumarjo. 2010. Pengaruh Karakteristik Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret
- Trisnawati, Mya Dewi dan Komarudin Achmad. 2014. “Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet.” *Jurnal Universitas Brawijaya*.
- Trisnawati, M.D., & Achmad, K., 2014. *Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemda melalui Internet. Simposium Nasional Akuntansi XVII. Mataram. Lombok*.

Verawaty. 2015. Determinan Aksesibilitas Internet Financial Reporting Melalui E-Government Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII Medan*, September 2015.

Wau, I., & Ratmono. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Ketersediaan Dan Keteraksesan Internet Financial Reporting Oleh Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4): 1-12.